

BAB II

UPAYA-UPAYA PRESIDEN FILIPINA RODRIGO DUTERTE DALAM MEMBERANTAS NARKOBA DI FILIPINA

Peredaran narkoba telah sejak lama menjadi masalah nasional bagi Filipina, tidak hanya sebagai masalah keamanan namun juga terkait masalah kesehatan, sosial, dan ekonomi. Setiap tahun baik Bandar dan pengguna narkoba terus menyebar ke seluruh wilayah negara. Pada tahun 2008, survey berskala nasional yang dilakukan *Dangerous Drugs Board* (DDB) mendapatkan angka sebesar 1,7 juta pengguna narkoba. Hasil ini jauh lebih rendah dibandingkan pada tahun 2004 yang hingga mencapai 6,7 juta pengguna narkoba (Rappler, News Break, 2016). Angka ini pun merupakan para pengguna yang terdata ataupun tertangkap oleh pihak kepolisian ataupun badan-badan penanggulangan narkoba baik swasta maupun badan nasional.

Pada tahun 2015, *Philippine Drugs Enforcement Agency* (PDEA) melaporkan ada lebih dari 8,000 *barangay*¹ terbukti terjangkit narkoba. PDEA juga melaporkan, sekitar 20,51 % dari warga yang tinggal di 42,065 *barangay* memiliki kasus narkoba (Carcamo, 2015). Sebuah *barangay* dapat dikatakan terjangkit narkoba apabila dalam wilayah tersebut terdapat pengguna narkoba, kegiatan produksi narkoba, marijuana cultivator atau obat-obatan lainnya, tidak terbatas dengan jumlahnya (PNP, PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: "Double Barrel",

¹Barangay merupakan sebutan untuk suatu wilayah administrasi dengan lingkup yang lebih kecil, dikatakan desa atau kelurahan. Berasal dari bahasa Spanyol-Portugal.

2016). Berdasarkan survei nasional yang dilakukan DDB Group tahun 2015 lalu, ada sekitar 1,8 juta pengguna narkoba di Filipina, yang mana 38,36 % nya adalah pengangguran. Pada Februari 2016, PDEA kembali melaporkan bahwa 11,321 dari 42,065 barangay terjangkit narkoba, kebanyakan adalah daerah urban/kota. *National Capital Region* (NCR) memperoleh nilai tertinggi atas jumlah peredaran dan pengguna narkoba, yakni 92,96% dalam seluruh barangay-nya, disusul wilayah Calabarzon dengan 49,28%. (PNP, PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: "Double Barrel", 2016)

Negara Filipina sejak dulu telah menjadi target pasar dari para sindikat narkoba dunia. Dari sekian banyak jenis-jenis obat terlarang yang baru, shabu masih menjadi obat kesukaan, dengan 95,47% kasus khusus untuk shabu-shabu dan 4,29% sisanya adalah kasus marijuana, di tahun 2015 (PDEA, 2015). Obat-obat terlarang tersebut terus diseludupkan masuk ke Filipina melalui berbagai jalur, baik jalur udara, darat, dan laut. Narkoba tersebut disembunyikan di berbagai benda dengan cara yang berbeda-beda, diantaranya dengan memasukannya kedalam pil kapsul, kotak susu, kantong teh, dan bahkan menggunakan pelayanan jasa antar pribadi untuk mengantarkan narkoba yang tersembunyi di sepatu dan charger ponsel (DDS, 2015).

Terdapat tiga sindikat organisasi transnasional narkoba yang berhasil ditemukan oleh PNP. Tiga organisasi transnasional tersebut dapat beroperasi dengan leluasa di Filipina dan pergerakannya telah menyebar hingga ke seluruh barangay, dan bahkan luar negeri. Mereka adalah The Chinese atau Filipino-Chinese, The

African Drug Syndicate (ADS), dan The Mexican-Sinaloa Drug Cartel. Masing-masing dari ketiga organisasi sindikat narkoba ini memiliki wilayah dan pekerjaannya. Contohnya, seperti The Filipino-Chinese, sindikat ini memfasilitasi produksi dan penyeludupan untuk wilayah nasional. ADS melakukan penyeludupan narkoba dari negara-negara di benua Afrika masuk ke seluruh negara Asia. Sedangkan The Mexican-Sinaloa Drug Cartel, merupakan asosiasi dari Chinese drug Group dan penetrasi dari pasar Filipino, mereka juga melakukan penyeludupan dan penjualan bebas narkoba di dalam negeri (PNP, PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: "Double Barrel", 2016). Kondisi peredaran narkoba yang terus berkembang di Filipina membuat Rodrigo Duterte memiliki kepedulian lebih dan bertekad untuk menghapus bersih narkoba di negaranya, bahkan sejak sebelum ia terpilih menjadi Presiden Filipina ke-16 pada pemilu lalu. Duterte merupakan orang pertama yang berasal dari kepala provinsi yang mendapat voting terbanyak, yakni 39,01% votes (16.601.997) dan berbeda 6,6 juta suara dari lawannya (Editors, 2016).

A. Kebijakan War on Drugs Duterte semasa menjabat sebagai Walikota Davao (1988-1998, 2001-2010, 2013-2016)

Duterte mengawali karirnya sebagai jaksa di tahun 1977 sebelum terjun ke dunia politik. Kemudian pada tahun yang sama disaat Filipina mengalami perbaikan demokrasi pasca pemerintahan ditaktor Ferdinand Marcos, yakni tahun 1983, Duterte dipercaya menjabat sebagai wakil Walikota Provinsi Davao. Hingga pada tahun 1988, Duterte maju dalam pemilihan Walikota Davao dan secara mengejutkan terpilih dan

menjabat hingga tahun 1998. Akibat adanya peraturan yang tidak memperbolehkan seseorang menjabat di jabatan yang sama selama lebih dari tiga kali kepemimpinan, Duterte mundur dari pemilihan Walikota dan maju sebagai perwakilan rakyat dalam house of representative dan menang. Tahun 1998 hingga 2001, Duterte menjabat sebagai Congressman di distrik 1 kota Davao, di bawah koalisi Laban ng Makabayang Masang Pilipino (Editors, 2016). Oleh sebab itu, pada pemilihan walikota tahun 2001, Duterte kembali mengajukan diri dan terpilih menjadi Walikota Davao, lebih jauh lagi, Duterte berhasil terpilih di pemilihan tahun 2004 dan 2007.

Pada masa kepemimpinan Duterte mendapat banyak sorotan perihal kebijakannya yang menuai pro-kontra baik di nasional maupun internasional, khususnya terkait bagaimana Duterte menyikapi dan menyelesaikan masalah kriminalitas. Namun, selain fokus pada masalah kriminalitas, Duterte juga peduli pada isu-isu kesenjangan kaum perempuan dan isu diskriminasi. Tahun 1998, Duterte mengeluarkan Peraturan Kota No. 5004 dan Peraturan Eksekutif no. 24 tentang "*The Women Development Code*". Peraturan ini merupakan hal yang pertama di Filipina yang bertujuan untuk mengembangkan potensi kaum perempuan agar tidak menjadi korban diskriminasi laki-laki. Dalam peraturan ini juga disebutkan selain untuk pengembangan potensi, kaum perempuan mendapatkan hak perlindungan dan hak kesetaraan (Mendoza, 2016). Adanya peraturan ini membuat nama Duterte semakin melambung tinggi di kalangan perempuan, dan hingga saat ini Duterte mendapat dukungan luar biasa dari kaum perempuan.

Duterte juga menginisiasi terbentuknya “Davao Central 911” atau “Dial 911”, nomer darurat publik pertama yang resmi digunakan pada tahun 2002. Seperti nomer darurat pada umumnya, nomer ini digunakan untuk melaporkan segala bentuk tindak kriminal yang mengancam keamanan dan kenyamanan warga kota Davao, kebutuhan bantuan medis, dan bantuan darurat lainnya (Mendoza, 2016). Segudang prestasi diterima Duterte seperti mendapat penghargaan *National Literacy Hall of Fame Award* dari *Outstanding Loyal Government Unit*, penghargaan *Highly Urbanized City* untuk kategori sampah (*thrice*), dan lainnya (Editors, 2016). Adapun peraturan-peraturan lain yang diberlakukan demi menciptakan keamanan dan kenyamanan warga kota Davao, yakni peraturan Anti-smoking (City Ordinance No. 0367-12) di tempat-tempat publik dan peraturan pelarangan minuman beralkohol (City Ordinance 1627) yang melarang segala bentuk transaksi dan kegiatan minum-minuman di tempat umum pada jam 2 dini pagi hingga 6 pagi, pada tahun 2013 diperketat menjadi 1 dini pagi hingga 8 pagi hari. Hal ini berlaku pada seluruh bisnis klub malam, rumah makan, dan bahkan destinasi turis asing (Tahonews, 2016).

Tertbukti dengan gaya dan cara kepemimpinan Duterte yang tegas dan keras, terutama soal pemberantasan tindak kriminalitas, Davao berubah menjadi kota yang damai dan nyaman. Davao yang sebelumnya masuk dalam kota di Filipina yang paling berbahaya karena banyaknya pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan, saat ini berada di urutan ke 9 sebagai kota yang aman dan menjadi destinasi favorit turis apabila mengunjungi Filipina. Hal-hal tersebut menjadikan Duterte sangat digemari

masyarakat Filipino dan mereka percaya bahwa Duterte dapat membawa perubahan yang baik bagi negaranya.

Rodrigo Duterte sukses mendapatkan kepercayaan masyarakat kota Davao yang dibuktikan dengan masa jabatannya sebagai Walikota Davao selama tiga periode berturut-turut. Selama menjadi Walikota, Duterte mengaku tidak pernah melakukan pekerjaannya di dalam ruangan kantor. Ia bekerja di jalanan dengan mengendarai motor besar nya dan melakukan konvoi bersama dengan pasukan bersenjata(Editors, 2016). Ia memberlakukan peraturan anti-merokok dan larangan menjual, menyajikan, dan mengonsumsi minuman beralkohol diatas jam 1 dini pagi hingga 8 pagi. Aturan ini berlaku untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan akibat mabuk.Meskipun dikenal tidak pandang bulu dalam mengeksekusi para Bandar narkoba, Duterte memberikan pemasukan bulanan kepada para Bandar ataupun pengguna terutama bagi mereka yang masih berada di bawah umur. Faktanya, ia memberikan sebanyak 2.000 peso per bulannya sekaligus menyediakan fasilitas rehabilitas di Rehabilitation Center for Drug Dependets berlokasi di Bago Tugbok, Kota Davao (Tahonews, 2016).

Davao Death Squad (DDS)

Rodrigo Duterte telah memimpin Davao sejak tahun 1998 hingga 2016 sebelum maju sebagai Presiden Filipina yang ke-16. Semenjak Duterte memimpin, kriminalitas yang terjadi di Davao menurun dengan drastis.Davao yang terkenal

sebagai wilayah di Filipina yang sangat berbahaya menjadi daerah wisata yang wajib di kunjungi karena keamanan dan kenyamanannya hingga hari ini. Hal ini dapat terwujud dengan adanya Davao Death Squad (DDS) yang ada untuk menghapus tindakan kriminalitas di Davao. .

Davao Death Squad merupakan unit yang dibentuk untuk mengeksekusi para kriminal yang berada di Davao. Mulai dari pelaku pencurian, pembunuhan, pemerkosa, dan Bandar narkoba menjadi target utama DDS sejak Duterte memimpin Davao tahun 1998-2015. Davao Death Squad dapat dikatakan termasuk dalam unit atau sekelompok orang bersenjata yang melakukan operasi pembunuhan terhadap target tertentu sesuai permintaan atau tujuan dibentuknya unit tersebut (Kroef, 1987). Diberitakan oleh AFP pada Desember 2016 lalu, Duterte mengakui jika dirinya telah membunuh beberapa pelaku kriminal dengan tujuan untuk mengurangi angka kriminalitas saat ia menjabat sebagai Walikota Davao. *“In Davao, I used to to it personally, just to show to the guys (police officers) that if I can do it, why can’t you. I’d go around in Davao with a motorcycle, with a big bike around, and I would just patrol the streets, looking for trouble also”*

Tidak ada sumber resmi yang membuktikan apakah Rodrigo Duterte berada di balik adanya Davao Death Squad atau tidak. Namun, tidak dapat dipungkiri, kelompok ini memberikan dampak signifikan bagi berkurangnya aksi kriminalitas, dan khususnya peredaran narkoba di kota Davao. Duterte pertama kali menjadi Walikota Davao pada tahun 1988, saat itu Kota Davao, yang merupakan wilayah

terluas di selatan Pulau Mindanao, dikenal sebagai “*murder capital of Philippines*” karena banyaknya aksi kriminal yang terjadi. Ia terpilih sebagai Mayor karena reputasinya sebagai jaksa dan anak dari mantan walikota. (HRW, 2017)

Kehadiran DDS mulai di blow up dari aktivis-aktivis lsm human rights dan media internasional. Para aktivis nasional mengatakan kehadiran dead squad yang mengeksekusi mati para pelaku kriminal, mulai dari pencuri, pemerkosa, dan Bandar narkoba, dimulai saat pertengahan 1990, tepatnya saat terpilihnya kembali Duterte sebagai Walikota Davao untuk kedua kalinya. Kelompok dead squad tersebut mengklaim diri mereka sebagai “Sulugon sa Katawhan” atau “Servants of the People”, yang kemudian oleh media disebut “Davao Death Squad.” (HRW, 2017).

Salah satu anggota DDS mengaku, Edgar Matobato soal campur tangan Duterte dalam oprasi DDS sekaligus ingin menjatuhkan nama Duterte yang baru saja menjabat sebagai Presiden Filipina dan menjalankan kebijakan yang sama dengan Davao terkait masalah kriminalitas khususnya Bandar narkoba.

B. Kampanye Pemilihan Umum Presiden Tahun 2016

Regulasi di Filipina yang tidak memperbolehkan seorang menduduki satu jabatan pemerintahan selama lebih dari 3 periode kepemimpinan membuat Duterte tidak lagi maju sebagai Walikota Davao. Justru, ia memperluas kepemimpinan dengan maju sebagai calon presiden Filipina pada Pemiliha Umum Filipina 2016.

Pada 21 November 2015, Duterte mengumumkan kepada media jika ia akan maju sebagai calon presiden Filipina di Pemilu mendatang. Dengan dukungan partainya, Partido Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan (PDP-Laban), Duterte mulai melakukan kampanye-nya sejak 9 Februari 2016 hingga 7 Mei 2016, selama 3 bulan di berbagai tempat. Duterte bersama kolega satu partainya Alan Pete Cayetano, membuka rangkaian kampanyenya di perempatan jalan Marga dan Zamora, Tondo, Manila (Viray, 2016). Dalam setiap kampanyenya, Duterte selalu mengatakan prioritas utamanya untuk menghapuskan narkoba dan juga aksi kriminal di negara jajahan Portugis tersebut. “.. *in 3 to 6 months to stop our corruption, I will suppress drugs, and drugs must be stopped!...*” ujar Duterte dalam video pembukaan kampanye Presiden berdurasi 1 menit, diposting pada 1 Februari 2016 dalam akun facebook resminya. (Duterte, *Salamat sa Rody Duterte Volunteers for Change*, 2016).

Selama proses kampanyenya, Duterte memiliki beberapa slogan yakni, *Tapang at Malasakit (Courage and Compassion)*, *Matapang na solusyon, Mabilis na aksyon (Fearless solutions fast action)*, *Change is coming*, dan *Atin to Pre! (This is ours, pal!)*. Masyarakat menyambut baik kampanye dan pencalonan Duterte sebagai Presiden Filipina berkar track records-nya sebagai walikota Davao yang dapat menekan angka kriminalitas hingga seminimal mungkin, sehingga masyarakat Filipina berharap akan terjadi hal yang sama di seluruh kota di Filipina. Duterte berhasil menempati peringkat pertama sebagai calon terkuat yang akan dipilih

masyarakat Filipino dalam survey yang dilakukan Social Weather Stations (SWS) pada minggu terakhir November 2016. Duterte tidak hanya menjadi pilihan pertama dari masyarakat yang berdasar kelas sosial ekonominya, namun juga yang berasal dari area geografisnya. (Astig, 2016).

Hal terkait pemberantasan peredaran narkoba tidak pernah absen dari bahasan kampanyenya. Berulang-ulang kali Duterte menyatakan dan menjanjikan dirinya akan memberantas kriminalitas terlebih peredaran narkoba selama 3 sampai 6 bulan awal masa kepresidenannya nanti. Adapun janji-janji Duterte lainnya kepada rakyat Filipino yang diucapkan saat melangsungkan kampanye kepresidenannya dalam kurun waktu Februari-Mei 2016 lalu (Inquirer, Inquirer Report 14 of 30 Duterte Promises now in Progress, 2016),

1. Memberantas Bandar Narkoba dan menghentikan peredaran narkoba di seluruh Filipina
2. Menurunkan angka kriminalitas di akhir tahun 2016
3. Meningkatkan peralatan dan persenjataan kepolisian dan militer
4. Roll out Davao's City's law and order measures on the national level
5. Menghentikan praktik korupsi di pemerintahan
6. Menguburkan mendiang mantan Presiden Ferdinand Marcos di the Libingan ng mga Bayani
7. Melanjutkan program Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) dari masa kepemimpinan Aquino

8. Halt previous land reform program
9. Mengembangkan pertanian kelapa untuk petani negeri
10. Mempromosikan perencanaan keluarga untuk mengontrol populasi berlebih
11. Lay claim to the nearest Chinese-occupied island
12. Menghentikan kerjasama dengan perusahaan penambangan yang merugikan lingkungan
13. Menyelesaikan masalah kemacetan di Metro Manila
14. Menganggarkan dana GDP untuk pembangunan infrastruktur hingga lebih dari 7%

Dalam setiap kampanye, Duterte memiliki ciri khas dalam setiap pidatornya, yakni selalu mengikuti outline tak tertulis yang sama: berantas kriminalitas, narkoba, dan korupsi. Kebanyakan dari pidato kampanyenya adalah pidato improtu karena Duterte tidak membaca catatan kecil atau membawa selebar kertas pidato apapun saat maju di hadapan rakyat Filipino. (Ranada, 2016).

Berantas kriminalitas, narkoba, dan korupsi menjadi topik utama dalam setiap kesempatannya berkampanye di hadapan rakyat Filipina. Menurut Duterte, dewasa ini narkoba berkembang sangat pesat di Filipina dan hal ini sangat mengkhawatirkan. Narkoba adalah hal yang dapat merusak bangsa, terutama generasi muda, dan apabila generasi muda suatu bangsa sudah rusak, negara tersebut tidak akan bertahan lama. Berikut beberapa penggalan pidato kampanye Duterte saat di Los Banos pada tanggal 11 Maret 2016,

“As to drugs, this has to stop. It is rampaging all around the country and (druglords) have graduated from the urban areas to the rural areas. There are some places in the Philippines –Visayas and even Mindanao- where they have penetrated the market of the rural folks and until now, they are asking for payment in the form of carabais, foats, chickens, eggs.”

“They say that’s too ambitious. My God, try me. That’s what I told the Davao criminals before. I had them called out, ‘Do you want to go out of the city? Do you want to go to Manila? Life is good there. Just fo there, you want?’ those who didn’t believe me are dead. What do we have to talk about?”

Dari penggalan pidato kampanye ini, dapat di tarik kesimpulan bahwa Duterte tidak akan segan-segan mengeksekusi mati para kriminal yang tidak ingin menyerahkan diri dan mematuhi peraturan negara. Duterte juga mengatakan akan memaksimalkan kepolisian dan militer untuk menangkap dan menghentikan para Bandar dan pelaku narkoba. *“..I told the military and police, only criminals, drug-related offenses, I will tell the police and military ‘go out and kill them.’ Period. Before you become a police, you have the situations where you can really kill. Of course, in the enforcement of the law because it is really to overcome the resistance and if you find yourself in jeopardy of losing your life, shoot. I will take care of it. Just follow my orders and do it on accordance with the book. Don’t go beyond what the book says. No abuse. I have the best police force in the entire Philippines. Really behaved..”*

C. Semasa menjabat sebagai Presiden Filipina (2016- sekarang)

Rodrigo Duterte resmi terpilih menjadi Presiden Filipina ke-16 dengan perolehan suara sebanyak 39,01%, menjadikannya mantan walikota pertama yang langsung naik menjadi Presiden. Sama seperti apa yang Duterte katakan dalam pidato-pidato kampanyenya, memberantas narkoba dan aksi kriminal lain menjadi prioritas utamanya selama menjadi Presiden Filipina. Duterte juga menargetkan untuk menghapus tuntas narkoba dalam kurun waktu 6 bulan pertama kepresidenannya, dimulai sejak bulan Juli hingga Desember 2016. Adapun hal-hal yang Duterte lakukan demi mencapai target tersebut, diantaranya:

PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan-Project “Double Barrel”

Segera setelah Duterte memasuki kantor kepresidenan, ia menunjuk Kepala Kepolisian Nasional Filipina, Ronald M Dela Rosa sebagai penanggung jawab dari Operating Plan (Oplan) Double Barrel. PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan-Project “Double Barrel” diresmikan pada tanggal 1 July 2016 melalui surat komando no. 16 tahun 2016. Dalam surat komando tersebut, disebutkan bahwa operasi ini, dilaksanakan atas perintah Presiden Duterte untuk menghapus secara tuntas peredaran narkoba di Filipina dalam 6 bulan awal kepemimpinannya (PNP, PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: "Double Barrel", 2016). Tujuan dari adanya operasi double barrel ini juga adalah untuk mendukung Barangay Drug Clearing Strategy dari pemerintahan dan menetralkan negara Filipina dari peredaran narkoba.

Barangay Drug Clearing Strategy merupakan regulasi yang dikeluarkan Barangay Anti-Drug Abuse Councils (BADAC) di tahun 2004 dan disempurnakan pada tahun 2007 silam. Sama seperti regulasi anti-narkoba lainnya, Barangay Drug Clearing Strategy adalah implemtnasi dari salah satu strategi pemerintah untuk menurunkan angka peredaran, penggunaan narkoba serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Filipina. Regulasi ini berfokus pada lingkup barangay, dan memberikan kewenangan kepada kepolisian daerah untuk melakukan operasi di wilayahnya (DDB, 2007).

Oplan Double Barrel tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan memiliki prosedur pelaksanaan atau konsep operasi seperti yang telah di sebutkan dalam Surat Komando PNP. Terdapat dua pendekatan yang dilakukan PNP dalam menjalankan Oplan Double Barrel, yakni dinamakan Project Tokhang dan Project HVT. Kata “Tokhang” sendiri berasal dari bahasa lokal dari Cebuano yaitu “Toktok-Hangyo” yang artinya “knock and plead” atau secara harfiah bermakna meminta secara sopan untuk menangkap dan menghentikan penggunaan narkoba (Tagalog Lang, 2002). Dalam pendekatan ini, PNP bekerja sama dengan unit pemerintahan lokal (LGUs / Local Government Units) terutama badan pemerintahan anti-narkoba dalam lingkup provinsi, kota, ataupun barangay. Selain dengan pemerintahan setempat, PNP juga bekerja sama dengan Non-Governmental Organizations (NGOs), badan hukum, dan para pemangku kebijakan (PNP, PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: "Double Barrel", 2016). Pemberantasan narkoba tidak bisa serta merta

dilakukan hanya oleh pihak kepolisian, butuh koordinasi yang baik antar badan-badan yang juga concern pada permasalahan anti-narkoba sehingga tujuan untuk membersihkan Filipina dari sarang narkoba berjalan maksimal.

Project Tokhang merupakan operasi langsung berhadapan dengan para tersangka Bandar ataupun pengguna dari rumah ke rumah. Tidak hanya menangkap, dalam operasi Tokhang, pihak berwajib juga menghimbau para tersangka Bandar dan pengguna narkoba untuk berhenti menggunakan narkoba dan memproduksi narkoba. Dalam operasi ini, Duterte memerintahkan kepolisian untuk tidak pandang bulu, menembak para tersangka Bandar dan pengguna narkoba, apabila terdapat tersangka yang memberontak ditangkap ataupun melakukan hal-hal yang membahayakan. Karena membunuh para kriminal bukanlah hal yang melanggar hak asasi manusia². Hukuman mati merupakan hukuman yang paling cocok untuk para pelaku kriminal karena mereka telah mengambil hak asasi milik orang lain dengan merugikan mereka secara material atau non-material. Sehingga hukuman mati adalah satu-satunya cara untuk memutuskan rantai tindak kriminal, terutama rantai peredaran narkoba di Filipina secara tuntas.

DDS dalam laporannya menyusun tahapan-tahapan sebuah barangay dapat dikatakan terjangkit narkoba atau tidak. Tahap pertama diberi istilah *slightly affected*, yakni apabila dapal sebuah barangay terbukti terdapat pengguna, hanya pengguna,

²"When you kill criminals that is not a crime against humanity. The criminals have no humanity. God damn it." ujar Presiden Rodrigo Duterte (02/03/2017) kepada reporter saat menghadiri ground breaking Cebu-Cordova Link Expressway.

narkoba. Kemudian, tahap *Moderately affected*, yakni terdapat pengguna sekaligus Bandar atau terjadi pasar transaksi narkoba yang aktif dan melibatkan komunitas yang besar. Terakhir, tahap *seriously affected*, yakni dalam sebuah barangay terdapat labotarium narkoba, transaksi narkoba dilakukan di tempat-tempat besar seperti resort, serta melibatkan komunitas yang lebih besar (DDS, 2015).

Ada 5 tahapan yang dilakukan pada tahap pendekatan Tokhang, yakni *Collection and Validation of Information Stage* atau Tahap Pengumpulan dan Pengesahan Informasi, *Coordination Stage* atau Tahap Koordinasi, *House to House Visitation Stage* atau Tahap Mengunjungi ke Rumah ke Rumah, *Processing and Documentation Stage* atau Tahap Proses dan Dokumentasi dan yang terakhir *Monitoring and Evaluation Stage* atau Tahap Pengawasan dan Evaluasi (PNP, PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: "Double Barrel", 2016).

1. *Collection and Validation of Information Stage* / Pengumpulan dan Pengesahan Informasi

Tahap ini dilakukan pada minggu pertama di bulan pertama masa kepresidenan Duterte. Seluruh sektor kepolisian lokal dan unit anti-narkoba melakukan pengumpulan dan pemeriksaan informasi terkait lokasi transaksi narkoba dan identitas para Bandar di setiap barangay. Identitas dan rincian kegiatan setiap target harus terekap dengan benar dan berasal dari sumber-sumber yang terpercaya agar tidak terjadi salah tangkap. Hal tersebut penting

agar dalam operasi langsung, tim Oplan Double Barrel memiliki bukti yang cukup dan kuat untuk menangkap para tersangka Bandar narkoba.

2. *Coordination Stage / Tahap Koordinasi*

Koordinasi yang baik harus tercipta untuk menyukseskan operasi house to house yang dilakukan, antara unit kepolisian, pemerintahan lokal, badan-badan anti-narkoba, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Kepolisian lokal berkoordinasi dengan LGUs dan BADAC untuk mendapatkan lokasi tersangka dengan tepat. Unit anti-narkoba PNP berkoordinasi dengan PDEA untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait tersangka narkoba. Kemudian, setiap Kepala Kepolisian lokal diharuskan menghadap ke Police Community Relations Sections dan berkoordinasi dengan LGU's, ADACs dan DDB terkait rehabilitasi pecandu narkoba. Selain itu, Kepala kepolisian lokal juga perlu berkoordinasi dengan QUAD Media sebagai sarana publikasi informasi kepada masyarakat umum tentang kondisi terbaru permasalahan narkoba.

3. *House to House Visitation Stage / Tahap Mengunjungi Rumah ke Rumah*

Tahap ini merupakan inti dari project Tokhang dan hanya tim yang ditunjuk yang dapat melakukan operasi ini. Operasi ini harus diselenggarakan serempak secara nasional. Tim yang bertanggung jawab harus memeriksa dengan pasti para anggota operasi. Pada saat pelaksanaan, dilakukan dengan sikap yang baik dan tidak merusak fasilitas apapun yang merugikan banyak

orang. Tersangka yang dengan suka rela menyerahkan diri harus diperlakukan dengan baik dan melalui proses yang jelas.

4. *Processing and Documentation Stage* / Tahap Proses dan Dokumentasi

Dalam tahap ini, tersangka yang menyerahkan diri secara suka rela diharuskan mengisi form *Voluntary Surrender* sebagai keperluan pendataan. Tersangka yang menyerahkan diri juga mendapat pendampingan dan diperbolehkan membawa salah satu sanak keluarga, serta bersedia memberikan informasi-informasi terkait narkoba kepada pihak kepolisian secara sukarela. Tersangka yang menolak mengakui keterlibatannya dengan narkoba dengan bukti-bukti yang ada, unit anti-narkoba berhak menginterogasi dan melakukan negosiasi dengan tersangka. Selain itu, pihak-pihak lain yang berada di area operasi Tohkang, seperti sanak keluarga atau orang lain yang bukan tersangka, berhak mendapatkan informasi tentang maksud dan tujuan pelaksanaan operasi ini. Dalam tahap ini juga, anggota yang melakukan operasi wajib menggunakan seragam kepolisiannya. Terakhir, Kepala kepolisian lokal harus menyerahkan laporan pelaksanaan operasi kepada Direktur Daerah PROs dalam waktu tidak lebih dari 24 jam setelah operasi berhasil dilakukan.

5. *Monitoring and Evaluation Stage* / Tahap Pengawasan dan Evaluasi

Pada pelaksanaan operasi dari rumah ke rumah, Kelapa Kepolisian Lokal dan unit anti-narkoba lainnya berkoordinasi dengan ADAC untuk

memberikan izin penangkapan di tempat dan pengarsipan data tersangka. Monitoring atau pengawasan dilakukan setiap minggu di setiap Barangay untuk menentukan status drug-affected mereka. Kepolisian lokal berkoordinasi dengan BADAC untuk melakukan pengawasan dan evaluasi operasi.

Project HVT (Upper Barrel Approach) merupakan project operasi yang lebih luas dan terfokus pada pengguna narkoba dan sindikat narkoba. Project ini dilakukan oleh para ahli, seperti penyidik dan ahli taktik dari National Support Units, dan anggota terpilih dari PRO, NCRPO, PPO, dan CPO. Project HVT dilakukan dalam skala yang lebih luas, yakni nasional, regional, provinsi, dan kota dengan fokus pada sindikat narkoba yang melakukan kegiatan pengedaran narkoba ke lain tempat dan produksi narkoba. Anti-Illegal Drug Group (AIDG) fokus pada peredaran narkoba tingkat nasional dan internasional. AIDG melacak dan mengoperasikan praktek jual-beli dan peredaran narkoba dari luar negeri ke dalam Filipina, maupun antar regional di dalam negeri. Operasi juga dilakukan di tiap-tiap perbatasan dengan data bukti yang valid dan akurat.

Terhitung sejak 1 Juli hingga 31 Desember 2016 Oplan Tokhang dilaksanakan, PNP berhasil menangkap total 1.143.896 bandar dan pengguna narkoba dalam skala nasional. Sebanyak 47,922 ditanggap dan 2,363 mati saat Oplan Tokhang berlangsung. Di luar dari angka tersebut, dalam operasi project HVT, sebanyak 388

bandar berhasil menyerah, dengan 126 tertangkap dan 25 terbunuh. Sementara itu, upaya internal PNP dalam menangkap para Bandar, sebanyak 1,130 tersangka ditangkap di bawah Direktorat Intelligence Watch. Selanjutnya, sebanyak 17 mendapatkan denda administratif dan 13 mendapat denda kriminal. Sebanyak 21 tersangka mati, 50 tersangka ditangkap dan 43 lainnya menyerahkan diri dibawah perintah Presiden Duterte. Serta 17 tersangka secara suka rela menyerahkan diri (PNP, Annual Report , 2016)

Berdasarkan laporan tahunan PNP di tahun 2016, Operasi Double Barrel dalam 6 bulan pertama masa kepresidenan Rodrigo Duterte, 95,78% menyerahkan diri kepada polisi baik dengan paksaan maupun sukarela, 2,13% di tangkap dan hanya 0,12 % yang mati dari pelaksanaan Oplan Double Barrel. Hal ini menandakan bahwa, tim Oplan Double Barrel yakni kepolisian dan pihak lainnya menjalankan Code of Conduct operasi dengan baik dan hanya membunuh tersangka yang menolak secara keras untuk di tangkap ataupun melakukan tindakan yang membahayakan dan merugikan sekitar.

Di Provinsi Bohol, sejak 30 Juni tahun lalu, Kepolisian provinsi Bohol melaporkan telah menangkap 37,986 bandar dan pengguna narkoba, dan sebanyak 24 tersangka mati. Hal ini disampaikan Seioner Inspector, Vincent Comaging, perwakilan dari Bohol Police Provincial Office (BPPO) dalam Provincial Peace and Order Council dan Provincial Anti-Drug Abuse Council, bulan February tahun 2017 lalu. BPPO melakukan operasi Tokhang pada 38,208 rumah di provinsinya dan berhasil

menangkap 36,366 pengguna narkoba yang menyerahkan diri secara sukarela, dan 1,630 drug pusher (Philstar, Bohol PNP reports; 37,966 surrender; 24 killed in Tokhang ops , 2017).

Sebelum adanya project dan perintah langsung dari Presiden Duterte terkait penangkapan bandar dan pengguna narkoba dengan skala nasional, PNP telah melakukan campaign juga untuk menangkap narkoba. Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Force (AID-SOTF), yang di Kepala oleh Antonio N Gardiola Jr, di tahun 2015 merupakan operasi yang hampir sama dengan Double Barrel. Kepolisian melakukan operasi ke rumah-rumah warga, tempat yang dicurigai menjadi sarang produksi narkoba, tempat yang di curigai sebagai tempat transaksi narkoba dan lainnya. Dalam PNP Annual Report 2015, campaign ini berhasil menangkap 42,700 bandar dan pengguna Narkoba, dengan 35,169 kasus masuk ke pengadilan. (PNP, Annual Report, 2015). Namun angka ini justru jauh lebih rendah dibandingkan hasil yang di dapat dengan operasi Double Barrel atas perintah Presiden Duterte. Padahal Double Barrel baru diberlakukan pada 6 bulan pertama masa kepresidenan Duterte. Hal ini kembali menandakan bagaimana Presiden Duterte serius dalam menggarap kebijakan War on Drugs untuk membersihkan Filipina dari sarang narkoba.

PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Project-Plan ALPHA

Project tambahan yang di perintahkan langsung oleh Duterte, setelah 3 bulan pertama melihat operasi Double Barrel, ia memutuskan untuk menentukan deadline

ulang, tidak jadi 6 bulan. Berdasarkan beberapa tantangan yang tidak ia perkirakan untuk menyelesaikan masalah peredaran narkoba di Filipina yang pelik. Project Plan Double Barrel ALPHA memfokuskan pada accounting the high value target personalities incolced in illegal drug and progressing towards the gb ultimate objective untuk membersihkan seluruh barangay dari narkoba.

Sedangkan pada Double Barrel Alpha, BPPO melakukan 56 operasi dari 26 Oktober hingga 31 Desember tahun lalu, berhasil menangkap 5,103 pengguna narkoba, 83 di arrest, dan 2 terbunuh. Under the same campaign, from October 26 to January 19 tahun ini, tersangka naik menjadi 5,452 93 tertangkap dan 2 terbunuh. Comanging menambahkan juga, jika dari 1,109 barangays di provinsi Bohol, 1092 terjangkau narkoba dan shanya 17 barangay yang tidak terjangkau narkoba sama sekali. (Philstar, Bohol PNP reports; 37,966 surrender; 24 killed in Tokhang ops , 2017).

ICAD (Inter-Agency Committee on Anti-Illegal Drugs)

Melalui perintah eksekutif No. 15 tahun 2017 President Duterte membuat badan anti-narkoba baru yang berisi 21 anggota departemen termasuk PDEA. Badan ini bernama Inter-Agency Commite on Anti-Illegal Drugs (ICAD), yang secara resmi beroperasi pada 6 Maret 2017 lalu. PDEA berperan sebagai chairperson dari ICAD dengan para anggota nya yakni (Duterte, Creation of an Inter-Agency Committee on Anti-Illegal Drugs (ICAD) and Anti-Illegal Drug Task Force to Suppress the Drug Problem in the Country, 2017):

1. Dangerous Drugs Board (DDB)
2. Departemen of the Interior and Local Government (DILG)
3. Department of Justice (DOJ)
4. Department of Health (DOH)
5. Department of Education (DepEd)
6. Department of Social Welfare and Development (DSWD)
7. Department of Trade and Industry (DTI)
8. Department of Agriculture (DA)
9. Department of National Defense (DND)
10. Technical Education and Skills Development Authority (TESDA)
11. Philippine Information Agency (PIA)
12. Public Attorney's Office (PAO)
13. Office of the Solicitor General (OSG)
14. Philippine Coast Guard (PCG)
15. Philippine National Police (PNP)
16. National Bureau of Investigation (NBI)
17. Bureau of Customs (BOC)
18. Bureau of Immigration (BI)
19. Armed Forces of the Philippines (AFP)
20. Anti-Money Launderung Council (AMLC)

Fungsi dari dibentuknya ICAD dengan banyak badan yang bergabung di dalamnya adalah, para anggota badan harus mengimplementasikan kampanye anti-narkoba dalam kebijakan dan hukum dalam badan tersebut, demi membebaskan Filipina dari sarang narkoba. PDEA selaku chairperson mengkoordinasikan pelaksanaan operasi yang mana President Duterte akan menunjuk seorang yang akan menjadi kepala tim.